

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adnan. (2017). *Peradilan Pajak*. Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera.
- Alwasilah, A. Chaedar. (2011). *Pokoknya Kualitatif (Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif)*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Andriyanto, S. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2012). *Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Pengertian Pajak dan Prinsip-Prinsip Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dr. H. Abdul Helim, S. M. (2019). *Maqasid Al-Shariah Versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2013). *Buku Panduan Implementasi Peraturan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016). *Panduan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Daerah*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kusumasari, S. P. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahardika, I. K. (2019). *Teori dan Hukum Pajak*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nugroho, D. Riant. (2003). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pohan, Chairil Anwar. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Satya Graha Yudha, I. M. (2020). *Teori dan Praktik Perpajakan*. Jakarta Timur: Penerbit Erlangga.

Sitorus, R. J. (2017). *Implementasi kebijakan publik*. Jakarta Timur: Penerbit Erlangga.

Soediyono. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Soerjono, S. (2006). *Metode Penelitian Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Susilo, Wilhelmus Hary. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera.

Sutedi, Adrian. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Skripsi:

Arum, Harjanti Puspa. (2012). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 1, Nomor 1.

Aziz, F. A. (2018). Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia. *Al Manahij*, 3-15.

Dhano, Elisabeth D., Banda, Falentina L., Kapa, Sesionus. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pemilik Kos Dalam Membayar Pajak Rumah Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Rumah kos di Kota Kupang). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi (JRIA)*, 1(2), 5-7.

Djalaluddin, M. M. (2015). Pemikiran Abu Ishaqal-Syatibidalam Kitab Al-Muwafaqat. Al-Daulah, 296-298.

Ekasari, Luh Dina., & Lodan, Kristina. (2018). Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Jurnal OPTIMA*, Volume II No 2.

Hakim, L. (2020). Efektivitas implementasi kebijakan daerah: Studi kasus tentang koordinasi antar pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(3), 179-190.

- Haryono., Alam, Andi Samsu., & Nurlinah. (2013). Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos Di Kota Palopo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6 Nomor 2.
- Heryanto, T. (2018). Analisis Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 22(2), 137-149.
- Kurnia, R. (2020). Analisis efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(1), 64-76.
- Ningsih, Restika. (2019). *Tinjauan Yuridis Optimalisasi Pajak Usaha Rumah Kos Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel*. Uin Suska Riau, Riau.
- Nurmalasari, R., & Yusuf, A. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat dalam implementasi kebijakan publik di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 11(2), 193-202.
- Setyoningsih, E. V. (2019). Kajian Terhadap Pengenaan Denda Dala Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. *Umy*, 92-100.
- Suharto, E. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara pemda, DPRD dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(4), 122-139.
- Umatin, Siti Choirul. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Malang. Unisma Repository. Universitas Islam Malang, Malang.
- Wardhani, Puspita Indra., Pambudi, Wulansari Dwi., Fiaoza, Jenny., Alfanisa, Safira., Susanto, Helmi Zain., & Nashiruddien Kholif Al Albani. (2022). Identifikasi Pengaruh Pembangunan Rumah kos Terhadap Aktivitas Sosial Ekonomi Di Desa Pabelan Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Lageografia* Vol. 20, No 2.
- Widianingsih, N. N. (2018). Evaluasi implementasi kebijakan kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 10(1), 45-54.
- Wijayanti, I., & Mulyani, S. (2016). Taxation and economic growth: An empirical study in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 19(1), 53-62.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Sektor Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Sektor Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Pelapor Pejabat atau Pegawai Pemerintah dan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Walikota Kendari Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Peraturan Walikota Kendari Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Website :

Badan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (<https://bppsdm.kemenkeu.go.id>).

Badan Pusat Statistik. (<https://bps.go.id>).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : (<https://djbc.kemenkeu.go.id>).

Direktorat Jenderal Pajak. (<https://pajak.go.id>).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (<https://kemenkeu.go.id>).

Lembaga Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (<https://lpdp.kemenkeu.go.id>).

Pratiwi, R. Y. (2022, Desember 30). (<https://Www.Pajak.Com/Komunitas/Opini-Pajak/Mengenal-Perlawanan-Pajak-Secara-Pasif-Dan-Aktif/>)

